

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**  
**Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral**

**A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025**

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Triwulan IV Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulanan 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
<b>I</b>	<b><i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</i></b>					
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia	Persentase	85	85	107	120%
<b>II</b>	<b><i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas</i></b>					
2.1	Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia	Persentase	75	75	100	120%
<b>IV</b>	<b><i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang berkualitas</i></b>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Indeks	3 dari 4	3	3	100%

<b>IV</b>	<b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Profesional</b>					
<b>4.1</b>	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Persentase	85	85	100	117%

Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</b>
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Nilai Investasi dengan negara Mitra Indonesia**

**Latar Belakang**

Kerja sama ekonomi bilateral merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama bilateral yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi bilateral yang dikordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerjasama Bilateral dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama bilateral. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi bilateral yang dikordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Efektivitas kerja sama ekonomi bilateral ini diukur berdasarkan tiga komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

### 1. Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia (80%)

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi bilateral. Cakupan kesepakatan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, komitmen di bidang perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya yang relevan dengan kepentingan nasional.

Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi bilateral, diplomasi ekonomi, business matching, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini diberikan bobot sebesar 80% karena pelaksanaan kerja sama ekonomi bilateral merupakan tugas dan fungsi utama dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral.

Komponen ini merupakan indikator yang paling langsung dikendalikan dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang memiliki peran strategis sebagai koordinator utama lintas kementerian/lembaga dalam proses negosiasi, penyusunan, dan tindak lanjut komitmen kerja sama ekonomi bilateral. Hasil dari komitmen kerja sama tersebut dapat dituangkan dalam berbagai bentuk dokumen, seperti Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), Agreed Minutes, Joint Statement, atau dokumen komitmen lainnya yang disepakati dalam pertemuan atau forum bilateral yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar 20 Komitmen yang mencakup:

- (1) Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam
- (2) Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang
- (3) Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-AS
- (4) Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-China terkait kerja sama Pengembangan Twin Cities
- (5) Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-China dalam rangka pengembangan Supply Chain
- (6) Komitmen Kerja Sama Indonesia-Australia
- (7) Komitmen Kerja Sama Indonesia-Prancis
- (8) Komitmen Penyelesaian Substansial Perundingan Indonesia-EU CEPA
- (9) Komitmen Penyelesaian Substansi Perundingan Indonesia-EAEU FTA
- (10) Komitmen pada Forum Senior Officials Meeting Indonesia-Singapore dan Ministerial Meeting Indonesia-Singapura
- (11) Komitmen pada Forum PPDT 1.5 Indonesia-Jepang
- (12) Komitmen pada Forum Ministerial Meeting JCEC Indonesia-Korea **diganti menjadi "Komitmen pada Pertemuan Co-Chairs SKB RI-Belarus"**
- (13) Komitmen pada Forum WGTII RI-Rusia ke-6
- (14) Komitmen pada Forum SKB RI-Rusia ke-13
- (15) Komitmen pada Forum Board Meeting Prospera
- (16) Komitmen pada Forum Joint Indonesia-Germany Economic and Investment Committee (JEIC) **diganti menjadi "Komitmen pada Kerja Sama RI-Inggris dalam Kerangka Economic Growth Partnership (EGP)"**
- (17) Komitmen pada Forum Pertemuan Senior Economic Officials Meeting (SEOM) RI-Australia
- (18) Komitmen Implementasi dari Kesepakatan IK-CEPA

- (19) Komitmen Implementasi Kesepakatan IPEF
- (20) Komitmen Implementasi Implementasi MoU on Cybersecurity Indonesia-Australia

## **2. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)**

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain Australia, Republik Perancis, Republik Federal Jerman, Federasi Rusia, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Republik India, Republik Sosialis Vietnam, Jepang, Persatuan Emirat Arab, Amerika Serikat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Singapura, Republik Korea.

Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi sub komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Komponen ini di bobotkan sebesar 10% karena subkomponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha. Nilai perdagangan adalah indikator penting keberhasilan kerja sama ekonomi, namun dipengaruhi banyak faktor eksternal seperti dinamika pasar global, tarif, non-tarif barrier, dan kondisi mitra dagang. Peran Kemenko Perekonomian lebih pada fungsi fasilitasi dan koordinasi kebijakan sehingga termasuk komponen yang tidak dapat dikendalikan secara langsung.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 diproyeksikan sebesar USD 177.3 Milyar (dengan catatan Target Nilai Perdagangan periode Jan-Okt 2025 diproyeksikan sebesar USD 147,7 Milyar, dihitung secara proporsional)

Perhitungan target berdasarkan total nilai rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website Kementerian Perdagangan.

## **3. Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)**

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain Australia, Republik Perancis, Republik Federal Jerman, Federasi Rusia, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Republik India, Republik Sosialis Vietnam, Jepang, Persatuan Emirat Arab, Amerika Serikat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Singapura, Republik Korea.

Realisasi nilai investasi bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan.

Komponen ini di bobotkan sebesar 10% karena subkomponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha. Seperti perdagangan, nilai investasi juga sangat bergantung pada keputusan sektor swasta dan faktor eksternal seperti iklim usaha, regulasi, dan insentif. Kemenko Perekonomian memiliki peran dalam memperkuat iklim investasi melalui rekomendasi kebijakan, promosi dalam forum bilateral, atau mengawal isu investor, melakukan peninjauan kerja sama dengan negara mitra namun tidak secara langsung menarik investasi.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 diproyeksikan sebesar USD 32,29 Milyar (Target Nilai Investasi periode Jan-Sep 2025 diproyeksikan sebesar USD 24,22 Milyar)

Perhitungan target berdasarkan Total nilai Rata-rata investasi dengan negara mitra utama Indonesia 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website BKPM/Kementerian Investasi

Sehingga realisasi IKU 1.1 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian 3 komponen diatas.

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target sampai dengan Triwulan IV sebesar 85% dengan komponen target pencapaian dengan 22 komitmen kerja sama ekonomi, nilai perdagangan, dan nilai investasi.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, tingkat efektivitas kerja sama ekonomi bilateral dengan negara mitra utama Indonesia, yang diukur melalui jumlah komitmen serta nilai perdagangan dan investasi, telah mencapai **107%** dari target **85%**. Hal tersebut karena pada komponen komitmen kerja sama hingga TW IV telah terealisasi **23 komitmen kerja sama**, atau melampaui target 20 komitmen.

Lebih lanjut, ringkasan capaian tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi dengan negara Mitra Utama Indonesia.	Persentase	85%	107%	120% (Memuaskan)

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi dengan negara Mitra Utama Indonesia yang mencapai target merupakan cascading non direct dari Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia (80%), Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%), dan Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%) yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%.

Sampai dengan laporan ini disusun, hampir **Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia** telah terealisasi dengan adanya beberapa sedikit perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

Komitmen Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia yang terealisasi pada Triwulan IV yakni:

1. Pelaksanaan pertemuan Komite Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Korea dibawah kerangka IK-CEPA pada tanggal **20 November 2025**
2. Pelaksanaan Pertemuan Senior Officials Economic Meeting ke-4 RI-Australia pada tanggal **8 Desember 2025**

3. Pelaksanaan Penandatanganan Program Prospera Hibah Australia Fase II pada tanggal **9 Desember 2025**
4. Pelaksanaan Pertemuan dalam Rangka Forum Intersesi Pertemuan Co-Chairs SKB RI-Belarus pada tanggal **16 Desember 2025**. **Ini merupakan perubahan dari target awal** "Komitmen pada Forum Ministerial Meeting JCEC Indonesia-Korea"
5. Pertemuan Chief Negotiator Economic Growth Partnership (EGP) RI-Inggris pada tanggal **4 September 2025** dan **24 Oktober 2025**. Ini merupakan perubahan dari target awal "Komitmen pada Forum Joint Indonesia-Germany Economic and Investment Committee (JEIC)"
6. Pertemuan dalam kerangka implementasi dan tindak lanjut IPEF Pilar II, yakni:
  - a) Pertemuan Chief Negotiators IPEF pada tanggal 28 November 2025
  - b) Pertemuan IPEF LRAB Subcommittee and Board Meetings tanggal 2 Desember 2025
7. Pertemuan Menko Perekonomian dengan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer pada tanggal **22 Desember 2025** dan telah menyepakati substansi yang diatur dalam dokumen perundingan perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ ART).

Berdasarkan data tersebut serta pelaksanaan berbagai kegiatan hingga laporan ini disusun, proyeksi capaian komitmen kerja sama ekonomi dengan negara mitra pada Triwulan IV Tahun 2025 diperkirakan berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh intensifnya rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta mitra kerja sama pada Triwulan IV, yang difokuskan pada penguatan sinergi pelaksanaan program, penyelesaian hambatan teknis, serta kesepakatan atas langkah tindak lanjut bersama.

Terkait dengan capaian komponen nilai perdagangan dan nilai investasi dengan negara mitra, proyeksi pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025.

Realisasi nilai perdagangan pada Triwulan IV didorong oleh tingginya aktivitas ekspor dan impor dengan negara mitra utama pada sektor-sektor prioritas. Hal ini tercermin dari nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang mencapai USD 324,789 juta hingga Oktober 2025, atau melampaui secara signifikan proyeksi tahunan sebesar USD 177,330.78 juta.

Sementara itu, hingga laporan ini disusun, data realisasi investasi dari negara mitra baru tersedia untuk periode Januari–September 2025 dengan nilai sebesar USD 28,041 juta, dari target investasi periode Januari–Desember 2025 sebesar USD 32,470.27 juta.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Efektifitas Kerja Sama Ekonomi Bilateral melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi dengan negara Mitra Utama Indonesia			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Australia dalam kerangka SEOM	Terlaksana	Telah dilaksanakan Pertemuan ke-4 Senior Economic Officials' Meeting (SEOM) RI-Australia pada tanggal 8 Desember 2025 yang merupakan tindak lanjut dari mandat <i>Annual Leaders Meeting</i> (ALM) 2020 dan CSP 2025–2029 serta membahas perkembangan ekonomi global, dinamika perdagangan, penguatan resiliensi ekonomi, kerja sama multilateral (WTO, G20, OECD) dan regional (CPTPP, IPEF, ASEAN, AANZFTA, APEC), serta meninjau kemajuan <i>General Review IA-CEPA</i> dan persiapan deliverables menuju ALM 2026.
2	Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Indonesia melalui Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Implementasi Komitmen IPEF	Terlaksana	Telah dilaksanakan rangkaian pertemuan dalam rangka implementasi Komitmen IPEF khususnya dalam kerangka IPEF Pilar II, yakni melalui: a) Pertemuan Chief Negotiators IPEF pada tanggal 28 November 2025 b) Pertemuan IPEF LRAB Subcommittee and Board Meetings tanggal 2 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Perundingan Ketiga Perdagangan Resiprokal RI-AS (**12 – 17 Oktober 2025**)
- Perundingan Keempat Perdagangan Resiprokal RI-AS (**17-22 Desember 2025**)
- Pertemuan Bapak Menko dengan Wakil Presiden Konfederasi Swiss sekaligus Federal Councilor Guy Parmelin pada tanggal **1 Oktober 2025** dalam rangka membahas tindak lanjut implementasi Indonesia-EFTA CEPA
- Menghadiri Strategic Trade Management Week Filipina (STM) pada tanggal **12-13 November 2025**.
- Penandatanganan Perjanjian Indonesia-EAEU FTA pada tanggal 22 Desember 2025.
- Pertemuan Menko Perekonomian dengan Ketua Dewan Maritim Rusia tanggal 7 November 2025.

Pelaksanaan rencana aksi pada Triwulan IV Tahun 2025 telah memperhatikan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Upaya efisiensi tersebut antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan secara daring menggunakan Zoom Meeting, pemanfaatan *cloud drive* sebagai sarana penyimpanan dan pengelolaan seluruh dokumen pekerjaan Keasdepan yang dapat diakses dari berbagai lokasi serta dikerjakan secara kolaboratif, pelaksanaan pertemuan di dalam kantor, serta pelaksanaan kegiatan yang disinergikan dengan Kedutaan Besar.

Berdasarkan upaya efisiensi tersebut, diperoleh proyeksi penghematan anggaran sebesar Rp143.358.070. Selanjutnya, hasil efisiensi anggaran dimaksud dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan perundingan dengan Amerika Serikat terkait pembahasan tarif resiprokal AS, yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam RAB Tahun 2025 dan telah dilaksanakan pada Triwulan IV, yaitu pada tanggal 17–24 Desember 2025.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. **Keterbatasan anggaran**, Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran serta munculnya agenda perundingan tarif dengan Amerika Serikat pada pertengahan tahun/Triwulan IV—yang menjadi prioritas Presiden dan di mana Kemenko Perekonomian bertindak sebagai *lead negotiator*—anggaran yang terbatas telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perundingan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah pertemuan dengan negara mitra lainnya harus diselenggarakan secara virtual atau *hybrid*, serta partisipasi aktif dalam forum internasional dilakukan secara virtual.
2. **Keterbatasan sumber daya manusia**, khususnya di unit kerja KSE Bilateral, belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja yang semakin padat dan kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika kerja sama ekonomi bilateral.
3. **Keterbatasan akses informasi**, terhadap data perdagangan dan investasi, seperti *fact sheet* yang disusun oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi, serta data pendukung kerja sama ekonomi dengan negara-negara non-prioritas, menjadi tantangan tersendiri. Sejak tahun 2025, terjadi peningkatan intensitas pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan negara-negara mitra yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori negara prioritas, sehingga memerlukan data dan informasi yang belum sepenuhnya tersedia secara terstruktur.
4. **Adanya Perubahan target kegiatan**, akibat tidak tercapainya pelaksanaan forum kerja sama dengan beberapa negara mitra hingga akhir tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya restrukturisasi organisasi di negara mitra, seperti Jerman dan Korea, sehingga forum bilateral yang direncanakan belum dapat dilaksanakan. Sebagai penyesuaian, target kegiatan tersebut dialihkan dengan kegiatan lain yang muncul pada pertengahan tahun, sejalan dengan dinamika diplomasi Presiden Republik Indonesia dengan negara-negara mitra, dan berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. **Optimalisasi pelaksanaan pertemuan secara hybrid** dengan negara mitra, termasuk pemanfaatan fasilitas ruang kantor yang tersedia, serta menjajaki dukungan sponsor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.
2. **Peningkatan efisiensi pembagian tugas**, dengan fokus pada kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis, mengingat keterbatasan jumlah personel yang tersedia.
3. **Penguatan koordinasi lintas K/L**, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi, dalam rangka memperoleh data dan informasi perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi secara lebih cepat dan akurat

4. **Penyesuaian perencanaan kegiatan yang adaptif dan fleksibel**, terhadap dinamika kebijakan dan diplomasi internasional, dengan tetap menjaga keterkaitan antara target kinerja, indikator, dan capaian yang terukur.

2

## Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia**

#### **Latar Belakang**

Terwujudnya kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memastikan kerja sama ekonomi bilateral yang selaras dengan kepentingan nasional dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Ruang lingkupnya mencakup:

- penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional dalam kerja sama ekonomi bilateral;
- perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan kerja sama ekonomi bilateral yang efektif dan berkelanjutan;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan kerja sama ekonomi bilateral agar sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan nasional;
- pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kerja sama ekonomi bilateral; serta
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi terkait kerja sama ekonomi bilateral.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait ( rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap tiga sub-komponen utama yang menjadi lingkup Keasdepan KSE Bilateral, yaitu:

- 1) **Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral**
  - Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam
  - Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang
  - Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-AS
  - Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-China
  - Kesepakatan Kerja Sama Indonesia-Australia
  - Kesepakatan Kerja Sama Indonesia-Prancis
  - Kesepakatan Perjanjian Indonesia-EU CEPA
  - Kesepakatan Perjanjian Indonesia-EAEU
  
- 2) **Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian**
  - Komitmen Kerja Sama pada Forum Senior Official Meeting dan Ministerial Meeting RI-Singapura
  - Komitmen Kerja Sama pada Pertemuan Forum Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia-Jepang
  - Komitmen Kerja Sama pada Forum Pertemuan Tingkat Menteri Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC) Indonesia-Korea **diganti menjadi “Pertemuan Co-Chairs SKB RI-Belarus”**
  - Komitmen Kerja Sama pada Forum Pertemuan ke-6 Working Group on Trade, Industry, and Investment (WGII) RI-Rusia
  - Komitmen Kerja Sama pada Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI-Rusia
  - Komitmen Kerja Sama pada Board Meeting Prospera
  - Komitmen Kerja Sama pada Pertemuan Joint Indonesia-Germany Economic and Investment Committee (JEIC) **diganti menjadi “Pertemuan Chief Negotiator dalam Kerangka Economic Growth Partnership”**
  - Komitmen Kerja Sama pada Pertemuan Senior Economic Officials Meeting (SEOM) RI-Australia
  
- 3) **Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian**
  - Komitmen Kerja Sama dalam Implementasi dari Kesepakatan IK-CEPA
  - Komitmen Kerja Sama dalam Implementasi Kesepakatan IPEF
  - Komitmen Kerja Sama dalam Implementasi MoU RMIT Australia

Rekomendasi kebijakan yang dimaksud mencakup: penyelesaian komitmen yang telah disepakati, partisipasi aktif dalam forum bilateral, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil forum. Produk keluaran dari proses ini antara lain berupa: notula rapat, policy brief, dokumen rekomendasi kebijakan, laporan kegiatan, hingga laporan evaluasi kebijakan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

### Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Rancangan rekomendasi kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas. Surat Keluar);
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan Rapat Koordinasi dan Bahan Rapat Koordinasi dalam rangka mengidentifikasi Isu terkait Kerja Sama Ekonomi Bilateral. Contohnya Undangan Rapat Koordinasi Persiapan WGTII RI-Rusia atau Bahan Rapat Koordinasi Pembahasan Isu-isu dalam WGTII RI-Rusia.

### Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah telaah staf / kertas posisi Pemri/ Brief Notes/ Nota Dinas Laporan atas suatu pembahasan isu dalam mencapai kesepakatan kerja sama ekonomi bilateral. Contohnya Laporan Perkembangan Isu-isu dalam Pertemuan WGTII RI-Rusia.

### Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Kertas Posisi Pemri/ Talking Points/ Agreed Minutes/Protokol/Joint Report. Contohnya Protokol Pertemuan WGTII RI-Rusia atau Agreed Minutes Pertemuan SKB RI-Rusia.

#### Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan/ Brief Notes Hasil Evaluasi Kebijakan atau Hasil Tindak Lanjut Kerja Sama.

#### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 75% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan IV sebesar 75%

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar

100% atau mencapai lebih dari 100% dari target Tahun 2025 sebesar 75% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia	Persentase	75%	100%	120% (Memuaskan)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia yang mencapai target merupakan cascading non direct dari penyelesaian kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral, Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 75% atau setidaknya telah selesai sampai 3 proses tahapan.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.

Sampai dengan laporan ini disusun, persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyelesaian komitmen, partisipasi dalam forum, dan implementasi kebijakan kerja sama ekonomi bilateral dengan negara mitra Indonesia telah menunjukkan capaian yang signifikan.

Capaian tersebut mencakup tiga tahapan proses utama, yaitu:

- ➔ Identifikasi isu kerja sama ekonomi,
- ➔ Koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L melalui pelaksanaan rapat koordinasi dengan K/L terkait maupun dengan pelaku usaha, hingga
- ➔ Formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan,

yang ditandai dengan telah disepakatinya bentuk kerja sama melalui berbagai dokumen resmi seperti Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), Minutes of Meeting, Joint Report, dan dokumen kesepakatan lainnya.

Adapun kegiatan yang tercapai antara lain:

- Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral
  - ➔ Kesepakatan Kerja Sama Bilateral RI-AS melalui Kesepakatan Substansi pada Perundingan Perdagangan Resiprokal RI-AS pada Pertemuan Menko Perekonomian dengan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer pada tanggal **22 Desember 2025**
  - ➔ Kesepakatan Kerja Sama RI-Australia melalui Penandatanganan Program Prospera Hbah Australia Fase II pada tanggal 9 Desember 2025.
  - ➔ Kesepakatan Kerja Sama Indonesia-EAEU FTA melalui Penandatanganan Perjanjian RI-EAEU FTA pada tanggal 22 Desember 2025.
  
- Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
  - ➔ Kesepakatan Kerja Sama pada Pertemuan Co-Chairs SKB RI-Belarus tanggal **16 Desember 2025**. Ini merupakan **perubahan dari target awal "Kesepakatan pada Forum Ministerial Meeting JCEC Indonesia-Korea"**
  - ➔ Kesepakatan Kerja Sama pada rangkaian Pertemuan Chief Negotiator Economic Growth Partnership (EGP) RI-Inggris pada tanggal 4 September 2025 dan 24 Oktober 2025. Ini merupakan **perubahan dari target awal "Kesepakatan pada Forum Joint Indonesia-Germany Economic and Investment Committee (JEIC)"**
  - ➔ Kesepakatan Kerja Sama pada Pertemuan Senior Officials Economic Meeting (SEOM) ke-4 RI-Australia pada tanggal **8 Desember 2025**
  
- Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
  - ➔ Pelaksanaan Pertemuan dalam kerangka implementasi dan tindak lanjut IPEF Pilar II, yakni:
  - ➔ Pertemuan Chief Negotiators IPEF pada tanggal 28 November 2025
  - ➔ Pertemuan IPEF LRAB Subcommittee and Board Meetings tanggal 2 Desember 2025
  - ➔ Pelaksanaan pertemuan Komite Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Korea dibawah kerangka implementasi IK-CEPA pada tanggal 20 November 2025

Berdasarkan data diatas serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan laporan ini di disusun, capaian komitmen kerja sama ekonomi dengan negara mitra pada Triwulan IV tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta mitra kerja sama pada Triwulan IV mnaupun pada TW sebelumnya. Rapat-rapat tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program, menyelesaikan hambatan teknis, serta menyepakati langkah tindak lanjut bersama.

Selain capaian diatas, terdapat capaian Kerja sama ekonomi lainnya yang telah terlaksana sampai dengan Triwulan IV yakni:

- Perundingan Ketiga Perdagangan Resiprokal RI-AS (12 – 17 Oktober 2025)
- Perundingan Keempat Perdagangan Resiprokal RI-AS (17-22 Desember 2025)
- Pertemuan Bapak Menko dengan Wakil Presiden Konfederasi Swiss sekaligus Federal Councilor Guy Parmelin pada tanggal 1 Oktober 2025 dalam rangka membahas tindak lanjut implementasi Indonesia-EFTA CEPA
- Menghadiri Strategic Trade Management Week Filipina (STM) pada tanggal 12-13 November 2025.
- Pertemuan Menko Perekonomian dengan Ketua Dewan Maritim Rusia tanggal 7 November 2025.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

<b>2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan Negara Mitra Indonesia</b>			
<b>No</b>	<b>Rencana Aksi TW IV</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b> (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi Isu-isu kerja sama ekonomi Indonesia-Australia	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada saat pertemuan Deputy II dengan Pemerintah Australia/DFAT dan Wakil Dubes Australia untuk Indonesia pada tanggal 7 November 2025 serta beberapa kali pertemuan lainnya bersama dengan perwakilan Kedubes Australia pada tanggal 25 November 2025 untuk membahas potensi isu-isu yang akan dibahas pada Pertemuan SEOM ke-4 serta Persiapan Penandatanganan Subsidiary Arrangement Prospera Fase II.

2	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SEOM RI-Australia	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan ke-4 Senior Economic Officials Meeting RI-Australia pada tanggal 4 Desember 2025 untuk membahas update pekrmebangan isu kerja sama bilateral RI-Australia yang akan dibahas dalam pertemuan SEOM.
3	Pertemuan Senior Economic Officials Meeting (SEOM) RI-Australia dan Penandatanganan Minutes SEOM RI-Australia	Terlaksana	<p>Pertemuan Senior Economic Officials Meeting (SEOM) RI-Australia telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 secara hybrid di Canberra, Australia.</p> <p>Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis kedua negara, antara lain Energi Bersih, General Review Indonesia-Australia CEPA, Akses Indonesia pada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) serta isu ekonomi strategis lainnya</p>
4	Identifikasi isu-isu kerja sama dalam rangka Tindak Lanjut Kerja Sama IPEF	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi Tripartit untuk Persiapan IPEF LRAB - Board Meeting pad atanggal 1 November 2025 serta rapat-rapatterkait IPEF lainnya sepanjang tahun 2025
5	Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi IPEF	Terlaksana	Telah dilaksanakan pertemuan Bilateral dengan Pihak Australia pada tanggal 26 November 2025 bersama dengan KL terkait lainnya untuk membahas posisi Indonesia dalam IPEF LRAB serta telah dilakukan juga pertemuan Chief Negotiator IPEF pada tanggal 28 November 2025 untuk membahas posisi masing-

			masing negara terhadap IPEF LRAB serta pandangan negara-negara terhadap kelanjutan kerja sama IPEF kedepannya.
6	Pertemuan Tindak Lanjut Implementasi dalam kerangka Kerja Sama IPEF	Terlaksana	Telah dilaksanakan Pertemuan IPEF LRAB Subcommittee and Board Meetings tanggal 2 Desember 2025 sebagai tindak lanjut implementasi dalam kerangka Kerja sama IPEF khususnya pada IPEF Pilar II

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pertemuan Intersesi Perundingan Perdagangan Resiprokal RI-AS pada tanggal **1-3 Oktober 2025**
- Pertemuan dengan MTI Singapura pada tanggal **6 Oktober** untuk membahas Tindak Lanjut Pertemuan The 15th Ministerial Meeting Six Economic Bilateral Working Groups Indonesia-Singapore
- Perundingan Ketiga Perdagangan Resiprokal RI-AS (**12 – 17 Oktober 2025**)
- Melakukan Pertemuan dengan Kedubes Australia untuk Finalisasi Akhir Penyusunan Subsidiary Arrangement Prospera Fase II pada tanggal **15 Oktober 2025**
- Pertemuan Deputi dengan Dubes Rusia untuk Indonesia pada tanggal **22 Oktober 2025** untuk membahas Tindak Lanjut Hasil dan Persiapan WGTII RI-Rusia dan SKB RI-Rusia.
- Pertemuan Menko Perekonomian dengan Dubes UK untuk membahas Tindak Lanjut EGP RI-Inggris tanggal **23 Oktober 2025**
- Menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk Memfinalisasi Posisi Pemri atau Counterdraft Indonesia atas MoU Kerja Sama Economic Growth Partnership (EGP) RI-Inggris pada tanggal **27 Oktober 2025**
- Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Posisi Pemri dan Counterdraft Indonesia atas balasan counterdraft dari Inggris atas Dokumen Arrangement EGP RI-Inggris pada tanggal **17 Desember 2025**.
- Pertemuan dengan EU Delegation untuk membahas EU Single Market dan Kebijakan Halal Indonesia pasca implementasi IEU-CEPA pada tanggal **29 Oktober 2025**
- Pertemuan Bilateral Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Selandia Baru untuk membahas percepatan penutupan sengketa DS477 tanggal **20 Oktober 2025**.
- Pertemuan Asdep dengan Perwakilan Delegasi JETRO untuk membahas Tindak Lanjut Isu dalam pertemuan Public Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 pada tanggal **3 November 2025**
- Menyelenggarakan Workshop Strategi Tindak Lanjut Negosiasi Tarif Resiprokal Indonesia – Amerika Serikat pada tanggal **6 November 2025**

- Pertemuan Deputi dengan Dubes Belarus untuk Indonesia pada tanggal **6 November 2025** membahas Rencana Penyelenggaraan SKB RI-Belarus dan Pertemuan Co-Chair
- Pertemuan Menko Perekonomian dengan Dewan Maritim Rusia tanggal **7 November 2025** untuk membahas Perkembangan Kerja Sama RI-Rusia untuk menindaklanjuti Hasil SKB RI-Rusia
- Pertemuan dengan Kedubes Australia untuk membahas persiapan Pertemuan SEOM RI-Australia dan Kunjungan Kerja Presiden RI ke Australia pada tanggal **14 November 2025**
- Pertemuan Menko Perekonomian dengan Dubes RI Brussels untuk membahas Tindak Lanjut Kesepakatan IEU-CEPA tanggal **26 November 2025**
- Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan Komite Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea dibawah kerangka IK-CEPA pada tanggal **17 November 2025**
- Menyiapkan substansi Pak Menko pada US-Indonesia Investment Summit pada tanggal **17 November 2025**
- Mendukung substansi Kehadiran Bapak Deputi sebagai Panelis pada Indonesia-Europe Investment Summit tanggal **27 November 2025**
- Menghadiri Rapat Pembahasan General Review IA-CEPA pada tanggal **20 November 2025**
- Perundingan Keempat Perdagangan Resiprokal RI-AS (**17-22 Desember 2025**)
- Menghadiri Strategic Trade Management Week Filipina (STM) pada tanggal **12-13 November 2025**.
- Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Isu Investasi Perusahaan Korea di Indonesia pada tanggal **3 Desember 2025**
- Rapat Pembahasan Teknis dan Substansi Kunjungan Deputy Prime Minister Belarus (Co-Chair SKB Belarus) ke Indonesia tanggal **3 Desember 2025**
- Pertemuan dengan DG MOTIE Korea membahas agenda Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC) ke-3 pada tanggal **5 Desember 2025** dan Isu Investasi Korea di Indonesia
- Menghadiri The 4th Committee on Trade in Goods Indonesia-Australia CEPA pada tanggal **11 Desember 2025**

Pelaksanaan rencana aksi pada Triwulan IV Tahun 2025 telah memperhatikan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Upaya efisiensi tersebut antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan secara daring menggunakan Zoom Meeting, pemanfaatan *cloud drive* sebagai sarana penyimpanan dan pengelolaan seluruh dokumen pekerjaan Keasdepan yang dapat diakses dari berbagai lokasi serta dikerjakan secara kolaboratif, pelaksanaan pertemuan di dalam kantor, serta pelaksanaan kegiatan yang disinergikan dengan Kedutaan Besar.

Berdasarkan upaya efisiensi tersebut, diperoleh proyeksi penghematan anggaran sebesar Rp143.358.070. Selanjutnya, hasil efisiensi anggaran dimaksud dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan perundingan dengan Amerika Serikat terkait pembahasan tarif resiprokal AS, yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam RAB Tahun 2025 dan telah dilaksanakan pada Triwulan IV, yaitu pada tanggal 17–24 Desember 2025.

## Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. **Keterbatasan anggaran**, Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran serta munculnya agenda perundingan tarif dengan Amerika Serikat pada pertengahan tahun/Triwulan IV—yang menjadi prioritas Presiden dan di mana Kemenko Perekonomian bertindak sebagai *lead negotiator*—anggaran yang terbatas telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perundingan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah pertemuan dengan negara mitra lainnya harus diselenggarakan secara virtual atau *hybrid*, serta partisipasi aktif dalam forum internasional dilakukan secara virtual.
2. **Keterbatasan sumber daya manusia**, khususnya di unit kerja KSE Bilateral, belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja yang semakin padat dan kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika kerja sama ekonomi bilateral.
3. **Keterbatasan akses informasi**, terhadap data perdagangan dan investasi, seperti *fact sheet* yang disusun oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi, serta data pendukung kerja sama ekonomi dengan negara-negara non-prioritas, menjadi tantangan tersendiri. Sejak tahun 2025, terjadi peningkatan intensitas pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan negara-negara mitra yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori negara prioritas, sehingga memerlukan data dan informasi yang belum sepenuhnya tersedia secara terstruktur.
4. **Adanya Perubahan target kegiatan**, akibat tidak tercapainya pelaksanaan forum kerja sama dengan beberapa negara mitra hingga akhir tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya restrukturisasi organisasi di negara mitra, seperti Jerman dan Korea, sehingga forum bilateral yang direncanakan belum dapat dilaksanakan. Sebagai penyesuaian, target kegiatan tersebut dialihkan dengan kegiatan lain yang muncul pada pertengahan tahun, sejalan dengan dinamika diplomasi Presiden Republik Indonesia dengan negara-negara mitra, dan berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. **Optimalisasi pelaksanaan pertemuan secara hybrid** dengan negara mitra, termasuk pemanfaatan fasilitas ruang kantor yang tersedia, serta menjajaki dukungan sponsor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal.
2. **Peningkatan efisiensi pembagian tugas**, dengan fokus pada kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis, mengingat keterbatasan jumlah personel yang tersedia.
3. **Penguatan koordinasi lintas K/L**, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi, dalam rangka memperoleh data dan informasi perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi secara lebih cepat dan akurat
4. **Penyesuaian perencanaan kegiatan yang adaptif dan fleksibel**, terhadap dinamika kebijakan dan diplomasi internasional, dengan tetap menjaga keterkaitan antara target kinerja, indikator, dan capaian yang terukur.

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral**

#### **Latar Belakang**

Terwujudnya penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Kerja Sama Bilateral yang mencakup a). koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Bilateral; b). pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra Indonesia; dan c). pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra Indonesia.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Indeks Kepuasan} \\ & \text{Layanan Koordinasi,} \\ & \text{Sinkronisasi dan} \\ & \text{Pengendalian} \end{aligned} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4 (Baik) atas Indeks.

## Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 3 dari target Tahun 2025 sebesar Indeks 3 (Baik) dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Indeks	3 dari 4	3	100% (Memuaskan)

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral pada tahun 2025 ditargetkan sebesar indeks 3 dari 4. Sampai dengan laporan ini disusun, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral telah melakukan Survey Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral untuk Semester II dengan nilai indeks rata-rata sebesar 3 sehingga target tahun 2025 telah terpenuhi.

## Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral Semester II	Terlaksana	Telah dilaksanakan menyampaikan form survey kepuasan layanan SKP di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral Semester II kepada K/L terkait lainnya dan telah didapat nilai indeks rata-rata senilai 3.

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Profesional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Profesional, Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral**

**Latar Belakang**

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bilateral merupakan persentase pemenuhan bukti dukung atas pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi) Reformasi Birokrasi (RB) general di lingkungan Asisten Deputi.

Adapun komponen penilaian dalam mengukur persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi general di lingkungan Asisten Deputi Bilateral yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
2. Tingkat Maturitas SPIP
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB general di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80% atas Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral. Adapun target triwulan IV sebesar 85%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 85% atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral	Persentase	85%	100%	117 % (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral pada tahun 2025 ditargetkan 80%. Sampai dengan laporan ini disusun, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral telah melakukan seluruh 3 (tiga) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Triwulan IV tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV
2. Penyusunan Laporan Capaian TW IV RB Tematik
3. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Adapun hingga Triwulan IV tahun 2025, **Realisasi** Renaksi RB Asdep KSE Bilateral adalah 15 dari target 15, atau sebesar **100%**. **Dengan demikian berdasarkan target capaian 85%, maka Capaian Kinerja hingga TW 4 pada IKU ini adalah 120%**.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

<b>4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral</b>			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan  (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV	Terlaksana	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja TW IV dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kinerja
2	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	Sebagai persiapan memasuki tahun 2026, Keasdepan KSE Bilateral telah

			mengidentifikasi beberapa target untuk dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Dalam pelaksanaan persuratan dan dokumentasi Keasdepan Asisten Deputi KSE Bilateral telah menggunakan dan memanfaatkan Srikandi secara optimal

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- ➔ Monitoring dan Evaluasi untuk Capaian Kegiatan dan Anggaran Asdep Bilateral melalui E-Monev Bappenas setiap bulannya.
- ➔ Melaksanakan pengisian capaian Triwulan IV untuk RB Tematik

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting, menfurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas yang telah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan SRIKANDI, dan memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp143.358.070. Proyeksi efisiensi tersebut sejalan dengan instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah terhambatnya optimalisasi penggunaan SRIKANDI. Pada aplikasi SRIKANDI sering kali sulit diakses atau sulit untuk dilakukan penandatanganan sehingga proses persuratan terhambat.

Berdasarkan kendala-kenadala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya atau rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah dengan memanfaatkan Whatsapp sebagai media koordinasi dengan para PIC untuk penyampaian surat dan nota dinas kepada pihak terkait serta melakukan back up data persuratan secara luring.

Jakarta, 14 Januari 2026

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral



**Irwan Sinaga**